



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [sespridirjenprl@kkp.go.id](mailto:sespridirjenprl@kkp.go.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN  
DAN RUANG LAUT  
NOMOR 44 TAHUN 2024  
TENTANG**

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN  
DAN RUANG LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola dan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
- Mengingat : 1. Peratuan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2023);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT.

KESATU : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang selanjutnya disebut Tim PPID DJPKRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tim PPID DJPKRL sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. PPID;
- c. PPID Pembantu;
- d. Sekretariat PPID selaku Petugas Pelayanan Informasi Publik, terdiri atas:
  1. Koordinator Sekretariat PPID;
  2. Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik;
  3. Koordinator Bidang Uji Konsekuensi;
  4. Koordinator Bidang Sengketa Informasi;
  5. Koordinator Bidang Data dan Informasi,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGA : Tim PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas meliputi:

- a. Atasan PPID
  1. menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
  2. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;

3. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik yang informasinya dikuasai oleh PPID Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; dan
  4. menyampaikan laporan tahunan layanan informasi publik PPID Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut kepada atasan PPID Kementerian.
- b. PPID
1. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik yang telah ditetapkan atasan PPID;
  2. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan informasi publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
  3. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID dalam rangka penyebaran informasi publik;
  4. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk membantu pelaksanaan tugas PPID;
  5. menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik;
  6. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
  7. mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
  8. mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di unit organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
  9. mengoordinasikan:
    - a) pengumpulan seluruh informasi publik;
    - b) pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
    - c) pemberian dan penyampaian informasi publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik;
  10. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
  11. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID unit organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
  12. membantu PPID Kementerian melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
  13. melakukan pengujian konsekuensi untuk PPID unit organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;

14. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik;
  15. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik;
  16. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan layanan informasi publik;
  17. memenuhi permintaan informasi publik dari PPID Kementerian;
  18. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
  19. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID unit organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut kepada PPID UPT;
  20. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon;
  21. memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik dalam hal permintaan informasi publik ditolak;
  22. melakukan penghitaman atau pengaburan materi informasi yang dikecualikan dan memberikan alasannya;
  23. menyusun dan mengusulkan daftar informasi publik dan daftar informasi publik yang dikecualikan untuk PPID unit organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; dan
  24. menyusun laporan layanan informasi publik.
- c. PPID Pembantu membantu PPID melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan layanan informasi publik pada unit organisasi Eselon II.
- d. Sekretariat PPID selaku Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan PPID Kementerian dan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.
1. Sekretariat PPID
    - a) Koordinator Sekretariat PPID bertanggung jawab mengoordinasikan sekretariat PPID dengan sekretariat PPID Kementerian dalam pengelolaan informasi dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
    - b) Anggota

- membantu PPID dalam melaksanakan pengelolaan informasi dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
2. Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik
    - a) Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Humas dan Pelayanan bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik di bidang informasi publik, kehumasan, dan pelayanan lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
    - b) Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Program bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik di bidang program dan anggaran lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
    - c) Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Keuangan dan BMN bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik di bidang keuangan dan BMN lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
    - d) Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik SDM Aparatur dan Organisasi bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik di bidang keuangan dan BMN lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
    - e) Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Dukungan Manajemen bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik di bidang dukungan manajemen lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
    - f) Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Peraturan Perundang-undangan bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik di bidang peraturan perundang-undangan lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
    - g) Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Kerja Sama bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik di bidang kerja sama lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
    - h) Anggota

Membantu PPID dalam melaksanakan penyusunan informasi publik di bidang informasi publik, kehumasan, dan pelayanan, program, keuangan dan BMN, dukungan manajemen, peraturan perundang-undangan, dan kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

3. Bidang Uji Konsekuensi

a) Koordinator

bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bersifat rahasia dengan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk dilakukan pengklasifikasian informasi publik.

b) Anggota

1) membantu PPID dalam melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bersifat rahasia dengan pejabat yang menguasai informasi dimaksud di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; dan

2) mengelola informasi tertentu untuk dilakukan pengklasifikasian informasi publik

4. Bidang Sengketa Informasi

a) Koordinator

bertanggung jawab mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyelesaian sengketa informasi publik.

b) Anggota

1) membantu PPID dalam menyiapkan bahan penyelesaian sengketa informasi publik; dan

2) menyiapkan bahan persidangan sengketa informasi publik.

5. Bidang Data dan Informasi

a) Koordinator

bertanggung jawab mengoordinasikan pelayanan informasi satu data yang dikuasai Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut serta diseminasinya.

b) Anggota

1) membantu PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi satu data yang dikuasai Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; dan

2) diseminasi informasi satu data Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

- KEEMPAT : Masa kerja Tim Teknis PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN  
RUANG LAUT,

ttd.

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut,

  
Kusdiantoro



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG  
LAUT  
NOMOR 44 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN  
KELAUTAN DAN RUANG LAUT TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN  
KELAUTAN DAN RUANG LAUT

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Atasan PPID		
1.	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	
PPID		
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	PPID Ditjen PKRL
3.	Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	PPID BKKPN Kupang
4.	Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang	PPID BPSPL Padang
5.	Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar	PPID BPSPL Denpasar
6.	Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak	PPID BPSPL Pontianak
7.	Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar	PPID BPSPL Makassar
8.	Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru	PPID LKKPN Pekanbaru
9.	Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong	PPID LPSPL Sorong
10.	Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang	PPID LPSPL Serang
PPID Pembantu		
11.	Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	PPID Pembantu Ditjen PKRL
12.	Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	PPID Pembantu Ditjen PKRL
13.	Direktur Jasa Kelautan	PPID Pembantu Ditjen PKRL
14.	Plt. Direktur Penataan Ruang Laut	PPID Pembantu Ditjen PKRL
Sekretariat PPID selaku Petugas Pelayanan Informasi Publik		

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fivien Ocktaviani, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Koordinator Sekretariat PPID
2.	Roka Pratama, Analis Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota
3.	Vidyana Frida Yuliani, Pranata Humas Ahli Pertama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota
4.	Kepala Subbagian Umum pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang	Anggota
5.	Kepala Subbagian Umum pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak	Anggota
6.	Kepala Subbagian Umum pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar	Anggota
7.	Kepala Subbagian Umum pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar	Anggota
8.	Kepala Subbagian Umum pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	Anggota
9.	Kepala Urusan Umum pada Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang	Anggota
10.	Kepala Urusan Umum pada Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong	Anggota
11.	Kepala Urusan Umum pada Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru	Anggota
<b>Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik</b>		
1.	Khairul Hidayati, Pranata Humas Ahli Madya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Humas dan Pelayanan
2.	Raden Tomi Supratomo, Perencana Ahli Madya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Program
3.	Ony Satiti, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Pengelolaan

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Keuangan dan BMN
4.	Dedhy Wibowo Setiawan, Analis Sumber Daya Manusia Ahli Muda pada Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Pengelolaan Keuangan dan BMN	Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik SDM Aparatur dan Organisasi
5.	Yudha Rajabudin, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Dukungan Manajemen
6.	Zuhriyah Ratnasari, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Peraturan Perundang-undangan
7.	Airin Melisa Manurung, Analis Kerja Sama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Kerja Sama
8.	Nanda Anindita, Analis Humas pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota
9.	Ikha Jayanti Mamayu Utami, Analis Pelayanan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota
10.	Ari Pariyanto, Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota
11.	Muhajah Babny Muslim, Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	Mahmud, Pranata Keuangan APBN Mahir pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota
13.	Pangih Prasetyo, Analis Organisasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota
14.	Arief Surya Wibowo, Analis Tata Usaha pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota
15.	Aimi Solidei Manalu, Analis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota
16.	Sofyan Rahman, Analis Kerja Sama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota
17.	Muh. Ismail Sakaruddin, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	Anggota
18.	Rosa Herettrenghi, Analis Tata Ruang pada Direktorat Penataan Ruang Laut	Anggota
19.	Denny Bijaksana, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda pada Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Anggota
20.	Rachmad Dian Kuncoro, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda pada Direktorat Jasa Kelautan	Anggota
21.	Melody Virginia, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir (BPSPL) Padang	Anggota
22.	Kety Intana Janesonia, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak	Anggota
23.	Saraswati Dewi Ariesta, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar	Anggota
24.	Dimas Kris Pratama, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar	Anggota
25.	Riyan Afif Al Ihsan, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama pada Balai Kawasan Konservasi Kawasan Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	Anggota

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
26.	Alyaa Farah Qonitah, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang	Anggota
27.	Bagus Luserius, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama pada LPSPL Sorong	Anggota
28.	Wahyudi Andrito, Analis Perencanaan pada Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru	Anggota
<b>Bidang Uji Konsekuensi</b>		
1.	Leri Nuriadi, Pranata Humas Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Koordinator Bidang Uji Konsekuensi
2.	Arief Nugroho Riyadi, Analis Hukum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota
3.	Udin Rojudin, Analis Publikasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota
<b>Bidang Sengketa Informasi</b>		
1.	Ajar Buditama, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Koordinator Bidang Sengketa Informasi
2.	Mhd. Jeffry Syam, Analis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota
3.	Dodi Robby Hari Ismanto, Analis Hukum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota
<b>Bidang Data dan Informasi</b>		
1.	Anita Setianingsih, Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Koordinator Bidang Data dan Informasi
2.	Nur Kholis, Analis Humas pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota
3.	Irfan Hadi Nursanto, Analis Pelayanan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota
4.	Lantip Wratsangka, Statistisi Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota
5.	Budi Prasetyo, Surveyor Pemetaan Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Sri Widodo, Pranata Komputer Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota
7.	Wahyu Setiawan, Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota
8.	Yarry Septia Larasati, Pranata Keuangan APBN Penyelia pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota
9.	Heri Sugianto, Analis Kepegawaian Ahli Pertama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota
10.	Arga Dimas Saputra, Arsiparis Ahli Pertama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota
11.	Vinosa Puspa Anjayani, Analis Humas pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota
12.	Zahrah Nurfadhilah, Analis Kerja Sama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota
13.	Vidlia Putri Rosady, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	Anggota
14.	Rinda Yayu Elisa Muhadyawanti, Enumerator Kelautan dan Perikanan pada Direktorat Penataan Ruang Laut	Anggota
15.	Apriani Nurlaela, Arsiparis Pertama pada Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Anggota
16.	Rininta, Penyusun Laporan Keuangan pada Direktorat Jasa Kelautan	Anggota
17.	Syahru Syawal, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang	Anggota
18.	M. Wahyu Al Hadi, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak	Anggota
19.	Kharisma Khabilillah, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar	Anggota
20.	Aditya Hidayatullah, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar	Anggota
21.	Ade Irmalia Harifa, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Balai Kawasan Konservasi Kawasan Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	Anggota

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
22.	Syifa Hoirunnisa, Arsiparis Pelaksana pada Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang	Anggota
23.	Masrul Jaya, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong	Anggota
24.	Muhammad Faisal Siddiq, Analis Perencanaan pada Loka Kawasan Konservasi Kawasan Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru	Anggota

DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN  
RUANG LAUT,

ttd.

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut,



Kusdiantoro

